

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Negara yang besar dalam perekonomian dapat saling dikaitkan, dan tidak dapat terlepas dari mapannya perekonomian Negara. Hal ini bahkan dapat dianggap memang sudah seharusnya dimana suatu Negara harus memiliki perekonomian yang mampu memakmurkan rakyatnya.

Negara bisa berperan besar dalam perekonomian, tanpa harus mengatur segala-galanya. Desentralisasi dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan merupakan langkah yang harus terus-menerus dikembangkan. Kuncinya adalah adanya kepercayaan kepada daerah-daerah atau pejabat eselon bawah, untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Perekonomian Indonesia terlalu besar untuk diatur semuanya dari pusat. Regionalisasi atau rayonisasi dari berbagai kebijakan, merupakan keharusan bagi suksesnya program-program pembangunan. Kebijaksanaan harus bersifat luwes untuk menampung perbedaan-perbedaan antar daerah dan antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda dalam tahap kekuatan ekonomi, dan dalam tahap perkembangannya.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia kecamatan memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian suatu daerah. Untuk Kecamatan indikator keberhasilan ekonominya bisa dikatakan dapat berhasil jika di Kecamatan yang bersangkutan telah terwujud suatu sistem perekonomian yang

handal, dan ditopang dengan sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA). Kualitas sumber daya manusianya yang telah maju dan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pendidikan sehingga berdampak kepada berkurangnya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan khususnya di daerah kecamatan yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur baik itu sarana dan prasarana pendidikan, transportasi, perhubungan dan lain sebagainya di daerah kecamatan juga dikatakan baik jika banyaknya sarana dan prasarana yang telah memadai untuk mendukung meningkatkan perekonomian masyarakat maupun untuk kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan, namun sarana dan prasarana lain seperti di bidang kesehatan perlu diperhatikan.

Sedangkan indikator pelaksanaan program pengembangan industri kecil pada kecamatan bisa dikatakan berhasil jika di kecamatan tersebut melakukan pengembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pemberian fasilitas bantuan permodalan dan pemasaran, dan pengembangan kerjasama dan pemberian fasilitas kemitraan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini, maka diharapkan akan semakin membuka peluang bagi daerah khususnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam menggali potensi-potensi yang menjadi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah setempat dalam meningkatkan potensi masyarakat setempat. Tingkat kecamatan merupakan eselon pemerintah terbawah di atas pemerintah

1. Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas terutama

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan. Kondisi pada saat sekarang ini sangat berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya, kecamatan adalah merupakan wilayah administratif dan kedudukan camat adalah sebagai administrator yang mana camat mempunyai wewenang secara sentral untuk mengkoordinasikan pembangunan berbagai instansi ditingkat kecamatan, untuk kecamatan memiliki peranan yang cukup besar dalam pengembangan potensi daerah. Disebutkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa kecamatan menurut undang-undang tersebut sebagai wilayah administratif dalam rangka dekonsentrasi. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2003 kedudukan kecamatan dirubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau kota. Yang mana menurut undang-undang ini camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari bupati atau walikota serta bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Jadi kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Hal tersebut berarti bahwa kepala daerah atau bupati mempunyai kewenangan atas segala tugas dan segala tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.

Meskipun kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota bagaimanapun pucuk pimpinan wilayah kecamatan adalah seorang camat sebagai seorang pemimpin khususnya pemimpin bagi aparatur pemerintah kecamatan. Seorang camat dapat dikatakan sebagai pemimpin formal dalam lingkungannya

penyelenggaraan pemerintahannya. Pembangunan yang telah dilakukan oleh kecamatan Mertoyudan telah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Konsekuensinya tuntutan akan kualitas dan kuantitas terhadap pelayanan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, bagi kecamatan Mertoyudan dituntut untuk lebih antisipatif dan responsif terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Mertoyudan sejak dahulu sudah memiliki berbagai ketrampilan untuk membuat berbagai kerajinan tangan antara lain dari bambu dan dari tanah liat. Melihat kondisi ini pemerintah kecamatan Mertoyudan berusaha meningkatkan potensi daerah tersebut untuk lebih berkembang. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengekspor hasil produksinya, tentunya ini bisa menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan penduduk Kecamatan Mertoyudan.

Setiap industri mempunyai kesempatan dan peluang untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Namun Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2004-2005 dalam renstranya memilih industri kecil sebagai obyek yang dikembangkan. Hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya industri besar dan sedang pada umumnya memiliki karakter kemandirian dalam pengembangan usahanya dan enggan menerima campur tangan dari pihak luar dalam urusan internal. Yang kedua adanya usulan dan permintaan dari masyarakat setempat untuk diberi

industri kecil memiliki pemikiran untuk mengembangkan namun membutuhkan bantuan dari kecamatan.

Beberapa hal lain yang menyebabkan kecamatan memilih industri kecil sebagai obyek yang dibantu adalah pola industri kecil yang sudah terbentuk sebagai suatu lokasi beberapa industri yang seragam untuk dijadikan suatu kelompok yang terorganisir, sehingga kelak dapat menjadi sentra industri maupun industri pedesaan yang dapat dikenalkan pada masyarakat luas.

Pemerintah kecamatan Mertoyudan selama ini hanya menitik-beratkan pembangunannya pada sektor fisik saja, karenanya sektor non fisik dirasa tidak begitu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat kecamatan Mertoyudan. Walaupun berbagai upaya untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan baik namun hasil yang didapat belum bisa dikatakan maksimal, karena masih diperlukan peningkatan kertrampilan dan pembinaan untuk memajukan industri kecil yang ada untuk menembus pasar nasional atau internasional. Memang salah satu upaya yang dilakukan telah berjalan seperti apa yang telah direncanakan ini bisa dilihat dengan salah satu program kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu keterkaitan kecamatan Mertoyudan dengan kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya adalah penyediaan beberapa unit transportasi darat yang merupakan alat transportasi masyarakat sehari-hari dalam melakukan aktivitas kerja. Dan juga dapat mendukung sektor pemasaran dari hasil-hasil

B. Perumusan Masalah.

Berangkat dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Peran Kecamatan Mertoyudan dalam Mengembangkan Sektor Industri Kecil di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2004-2005”?

C. Kerangka Dasar Teori.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.¹ Menurut Muchtar Mas`ud yang di maksud teori adalah:

Teori adalah bentuk penjelasan umum menjelaskan mengapa suatu (fenomena) itu terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan suatu hipotesa.²

Teori juga ungkapan mengenai hubungan kasual yang logis antara berbagai gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami dan menanggapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu.³

Dengan demikian serangkaian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Lp3ES, 1989 hal.37

² Muchtar Mas`ud, *Disiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990 hal.216

³

1. Peran

Pengertian peran menurut Blocck adalah sebagai berikut :

Suatu konsep yang dipakai oleh sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang social dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.⁴

Berdasarkan pendapat ahli diatas peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seorang atau kelompok karena tuntutan dari posisi yang didudukinya dalam pengaruhnya untuk mengambil suatu bentuk tindakan maupun pengambilan keputusan.

Menurut Soeryono Soekamto, peranan memiliki pengertian sebagai berikut :

Peranan (role) merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melakukan "peranan".⁵

Soeryono Soekamto dengan mengutip pendapat Levinson juga menyatakan bahwa peranan mencakup sedikitnya tiga hal, yaitu :⁶

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam organisasi.

⁴ Hubert M. Blocck, Jr. Pengantar Penelitian Sosial. Terjemahan Tim Penerjemah Yosogama, Rajawali Pers, 1987. hal 105

⁵ Soeryono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1987 hal 220

c. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

Berdasarkan tiga hal tersebut diatas peranan yang dilakukan harus melibatkan atau menggunakan suatu bentuk sarana untuk menjalankan peranannya. Dan juga segala sesuatu yang dapat dilakukan yang merupakan bentuk tindakan atau pengambilan keputusan yang seharusnya sesuatu dengan maksud dan tujuan dari kedudukan seorang atau organisasi.

2. Pemerintah Daerah.

Setelah pemerintahan orde baru berhasil melaksanakan konsolidasi kekuasaan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1968 disamping agenda perubahan ekonomi yang merupakan prioritas utama pemerintah, secara perlahan agenda-agenda lainnya mulai dicanangkan, termasuk dalam bidang pemerintah daerah.

Dalam undang-undang organik yang mengatur tentang pemerintah daerah yaitu undang-undang No. 32 tahun 2003, pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat otonom yang sebagai badan eksekutif daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pemerintah daerah juga dijelaskan oleh undang-undang yang sama dalam pasal 14 yang berisi:

1) Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah

- 2) Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.⁷

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah:

- 1) Digunakannya azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- 2) Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
- 3) Azas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

a. Desentralisasi.

Kata “desentralisasi” secara etimologi berasal dari bahasa latin “De” yang berarti lepas dan “contrum” yang berarti pusat.⁸

Dengan demikian konsep desentralisasi dapat dikonotasikan dengan adanya pelepasan wewenang oleh pemerintah pusat dan menjadi wewenang pemerintah local. Dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Maddick dari Kuncoro mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi. Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedang dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas

⁷ Ibid hal. 11

⁸ " dan Pendidikan Politik UGM, Yogyakarta

fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat.⁹

Menurut The Liang Gie “Desentralisasi” adalah:

Pelimpahan wewenang dari pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.¹⁰

Pendapat lain mengatakan :

Desentralisasi adalah suatu dimana bagian-bagian tugas Negara diserahkan penyelenggarannya kepada orang-orang yang sedikit banyak mandiri (independent). Orang yang mandiri ini wajib melakukan tugas pemerintah daerah atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri.¹¹

Adapun tujuan dari desentralisasi menurut Dr. Syarif Hidayah adalah sebagai berikut:¹²

- a. Mewujudkan demokrasi ditingkat lokal.
- b. Menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesungguhnya desentralisasi bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, seperti yang tertuang dalam tap MPR No. IV/MPR/2000 bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan pada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas pemerintah daerah. Adapun pencapaian serangkaian tujuan yang melalui kebijakan adalah dimana satu pihak membebaskan dari beban-beban yang

⁹ Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2004. hal. 3 – 4

¹⁰ The LiangGie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, rajawali press, Jakarta 1986, hal. 47

¹¹ Mariun, Op.cit

tidak perlu dalam menangani urusan domestik. Pada saat yang sama pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.¹³

Dengan adanya desentralisasi, kecamatan mendapatkan mandat/wewenang dari kabupaten untuk melaksanakan program kerja yang tertuang dalam Renstra Kecamatan. Kecamatan Mertoyudan dalam hal ini mendapat tugas untuk mengembangkan sektor perekonomian. Kecamatan Mertoyudan memilih pengembangan sektor industri kecil dalam pengembangan ekonomi daerah.

b. Kecamatan

1) Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Hal tersebut berarti bahwa kepala daerah atau bupati mempunyai kewenangan atas segala tugas dan tanggung jawab camat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten .¹⁴

2) Peranan kecamatan

Adalah semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat kecamatan yang ada di wilayah kecamatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai implementasi pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk menjalankan program-program kecamatan dan terselenggaranya

¹³ Rasyid, Prof. Dr. M. *Kegagalan Otonomi Daerah*, Media Indonesia, Jakarta 2000 hal.41

¹⁴ Rasyid, Prof. Dr. M. *Kegagalan Otonomi Daerah*, Media Indonesia, Jakarta 2000 hal. 20

kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh seorang camat merupakan eselon pemerintah daerah terbawah diatas pemerintah desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat luas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan.¹⁵

Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten yang tidak dapat berdiri sendiri karena setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda seperti kondisi alam. Dimana kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi perekonomian kecamatan yang bersangkutan. Dan pada akhirnya akan menyebabkan perbedaan pembangunan pula yang berdampak pada tingkat kesejahteraan antar daerah.¹⁶

Kecamatan Mertoyudan memiliki fungsi dalam pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi, dan distribusi serta pembinaan sosial.¹⁷

Program pengembangan industri kecil yang dimiliki kecamatan Mertoyudan berdasar pada renstra yang dibuat oleh tim penyusunan Renstra. Sedangkan Renstra yang juga menerangkan fungsi kecamatan dalam pembinaan perekonomian tersebut dibuat berdasarkan program kabupaten dalam pembangunan ekonomi.

¹⁵ Undang-undang otonomi daerah 2000 Restu Agung, hal. 29

¹⁶ Mudraiad Kuncoro, Ph D *Otonomi Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta. 2004. hal 128

Kabupaten memiliki beberapa program yang dilimpahkan ke beberapa kecamatan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing kecamatan. Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2004-2005 mendapatkan wewenang dari kabupaten untuk mengembangkan sektor ekonomi khususnya dibidang industri kecil. Karena potensi yang dimiliki kecamatan Mertoyudan mendukung antara lain mengolah sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut.¹⁸

3. Industri

a. Pembangunan Ekonomi

1) Perekonomian.

Dalam merencanakan kebijakan ekonomi pemerintah suatu Negara mengambil langkah-langkah yang berbeda sampai seberapa jauh peranan pemerintah tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh Negara yang bersangkutan, ada 3 (tiga) sistem perekonomian penting, yaitu: sistem perekonomian bebas, sistem perekonomian terpimpin, dan sistem perekonomian campuran.

2). Masyarakat.

Masyarakat merupakan sebuah istilah yang dalam bahasa Inggris disebut *society* (berasal dari kata latin *socius*, yang berarti kawan.)

masyarakat sendiri berasal dari kata Arab Syaraka, yang artinya “ikut serta” berperan serta.¹⁹

Menurut Koentjaraningrat definisi dari masyarakat adalah:

Sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi.

Menurut Hassan Syadily definisi masyarakat adalah:

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.²⁰

Menurut Ginanjar Kartasasmita pemberdayaan adalah:

Upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²¹

Memberdayakan masyarakat berarti upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu melepas diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan dalam memampukan dan memandirikan masyarakat.²²

¹⁹ Kata Arab Musyaraka berarti “*Saling Bergaul*” sedang dalam istilah dalam bahasa arab untuk masyarakat adalah Mu'itama

3) Perekonomian Masyarakat.

Menurut H. Achmad Tirta Sudiro perekonomian masyarakat adalah:

Suatu sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung-pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.²³

Beberapa ciri kegiatan ekonomi masyarakat:

- a) Kegiatan ekonomi selalu mengandung unsur bahwa orang harus memilih. Biasanya ada lebih dari satu cara untuk menangani suatu persoalan sehingga timbul pertanyaan mana yang terbaik. Mana jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan. Bagaimana sebaiknya mengendalikan inflasi. Bagaimana cara untuk menstabilkan harga. Tindakan apa yang sebaiknya diambil untuk mendorong ekspor, menciptakan lapangan kerja baru atau membangun desa. Untuk dapat menjawab pertanyaan seperti itu tidak secara ngawur melainkan secara bertanggung jawab, orang harus mempertimbangkan biaya dan laba (*cost and benefit*) dari masing-masing alternatif. Hal ini kerap kali sulit dan cukup kompleks, karena baik biaya maupun hasil yang diharapkan itu sering sulit diukur atau dirinci. Untuk itu perlu dikuantitifkan dulu sehingga dapat dihitung dalam uang menjadi biaya dan hasil.

- b) Ciri kedua terdapat dalam banyak kegiatan ekonomi masyarakat adalah untuk dapat memilih dari antara sejumlah kemungkinan, kerap kali orang harus meramalkan apa yang akan terjadi bila salah satu kemungkinan yang tersedia itu dipilih. Tekanan pada apa yang akan terjadi jelas menunjuk pada unsur ketidak-pastian. Misalnya untuk mengendalikan inflasi, menggalakkan ekspor Non Migas atau mendorong industrialisasi, pemerintah dapat menempuh berbagai cara. Mana yang paling baik tergantung dari dampak dan akibat dari masing-masing tindakan, apa yang akan terjadi besok hanya bisa diperkirakan, belum ada cara-cara ilmiah yang 100% dapat diandalkan untuk meramal masa yang akan datang, meskipun para ahli ekonomi telah mencapai kemajuan juga dalam bidang ini.
- c) Ciri ketiga dari kegiatan ekonomi masyarakat menyangkut peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. Mulai dari harga beras dan bahan bakar minyak sampai ongkos naik haji sepertinya tidak ada barang penting yang terlepas dari pengaruh campur tangan Negara. Ini bukan hanya soal praktis pengaturan atau pelaksanaan, melainkan juga menyangkut tata ekonomi atau ideologi yang dianut suatu bangsa. Tetapi juga didalam batas-batas wawasan yang ditetapkan oleh undang-undang dasar dan GBHN masih tetap dapat dipersoalkan hal apa yang sebaiknya ditangani oleh pemerintah dan mana yang lebih efisien diserahkan

- (1) Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah.

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa industri kecil merupakan salah satu jenis industri yang tidak hanya menggunakan proses modern tetapi juga industri yang dimana dalam proses produksi atau proses pengolahan bahan mentah atau setengah jadi, digunakan cara-cara tradisional serta industri yang menghasilkan benda-benda seni seperti industri kerajinan, yang keseluruhannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dimana pada umumnya jenis usaha ini diusahakan oleh rakyat Indonesia dari golongan ekonomi lemah. Oleh sebab itu industri ini hanya dapat diusahakan oleh Warga Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta

Menurut Biro Pusat Statistik, industri terbagi menjadi empat :²⁴

1) Industri Rumah Tangga

Industri kerajinan rumah tangga adalah suatu usaha yang memiliki karyawan antara 1 – 4 orang.

2) Industri Kecil

Industri Kecil adalah suatu usaha yang memiliki karyawan antara 5 – 19 orang.

3) Industri sedang

Industri yang memiliki karyawan yang cukup banyak bila dibanding dengan jumlah karyawan industri kecil 20 – 100 orang.

4) Industri besar

Merupakan industri yang memiliki jumlah karyawan yang lebih dari 100 orang.

Dalam Konteks mikro dan organisasi, industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk/jasa yang relatif sejenis, atau mempunyai sifat saling mengganti yang erat.²⁵

4. Peran Kecamatan dalam Pengembangan Industri Kecil

Dalam pembangunan ekonomi daerah peran kecamatan dapat mencakup peran-peran berikut²⁶:

a. Wirausaha

Sebagai wirausaha, kecamatan bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Kecamatan dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh kecamatan untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya, dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai

²⁵ Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta. 2004. Hal 204.

²⁶

macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja. Organisasi kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta

b. Koordinator

Kecamatan dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strateg-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator kecamatan dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi.

c. Fasilitator

Kecamatan dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah

.....

memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program tambahan yang lain.

d. Stimulator

Kecamatan dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha untuk masuk, misalnya dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya sewa pada beberapa tahun pertama. Dalam bidang kepariwisataan, kecamatan dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di obyek wisata tertentu.

Dalam perkembangannya industri kecil menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat yang memiliki lahan sempit dan minimnya modal untuk memulai usaha baru. Untuk itu diperlukan program pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan untuk menumbuh-kembangkan kembali kegiatan ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan peran serta lembaga lain dalam meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat secara produktif dan benar-benar berjiwa kooperatif. Upaya ini bisa dilakukan melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan

E. Definisi Konseptual.

Definisi ini menggambarkan adanya hubungan-hubungan antar konsep-konsep spesifik yang berbeda yang ingin diteliti agar penelitian ini dapat dipahami tanpa menimbulkan kekaburan maka perlu didefinisikan dengan jelas konsep-konsep tersebut:

1. Peran Kecamatan.

Adalah semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat kecamatan yang ada di wilayah kecamatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai implementasi pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk menjalankan program-program kecamatan demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan nyaman serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Perekonomian.

Dalam rangka merencanakan kebijakan ekonomi pemerintah suatu Negara mengambil langkah-langkah yang berbeda sampai seberapa jauh peranan pemerintah tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh Negara yang bersangkutan, ada 3 (tiga) sistem perekonomian penting, yaitu: sistem perekonomian bebas, sistem perekonomian terpimpin dan sistem

3. Masyarakat.

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

4. Peranan Kecamatan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh aparat kecamatan beserta instansi terkait yang berada di wilayah kecamatan tersebut untuk membina, membimbing, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan pemerintah khususnya dalam bidang perekonomian. Usaha yang dilakukan adalah menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan penunjang untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

F. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang berupa konstruksi dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji keberadaannya.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dari metode tersebut kemudian diolah secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami. Alasan penulis menggunakan deskriptif karena memang memungkinkan penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode tersebut dengan melihat permasalahan yang penulis teliti.

2. Lokasi Penelitian

Adapun rencana penelitian ini adalah wilayah kecamatan Mertoyudan. Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah dengan alasan bahwa kecamatan Mertoyudan termasuk kecamatan yang maju di provinsi Jawa Tengah, dan juga memiliki sektor pertanian dan perindustrian kecil yang sangat menonjol dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan kecamatan Mertoyudan. Namun dibalik potensinya tersebut, perekonomian warga kecamatan Mertoyudan melalui pertanian dan industri-industri kecil masih saja ada penduduk daerah yang hidup dibawah garis kemiskinaan. Atas dasar tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan studi penelitian khususnya mengenai Bagaimana Peranan Kecamatan Mertoyudan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dengan Meningkatkan Sektor Industri Kecil serta upaya-upaya pemerintah kecamatan dalam meminimalisir masyarakat yang

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang berasal dari sumber data yang pertama. Data primer yang diperlukan, diperoleh melalui jawaban dari responden melalui pertanyaan dan interview dengan pejabat kecamatan yaitu aparat kecamatan dan instansi terkait serta masyarakat.

Data primer merupakan data langsung hasil wawancara terhadap pejabat kecamatan dan masyarakat.

- b. Data Sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau data-data yang diambil dari pengguna sumber-sumber yang lain seperti dokumentasi, buku-buku, surat kabar, majalah, internet, perpustakaan serta laporan-laporan yang ada di kecamatan Mertoyudan berupa arsip-arsip kecamatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan tanya dan jawab, dimana sebelumnya penulis telah menyediakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden secara lisan.

b. Dokumentasi

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mempelajari arsip-arsip atau catatan, monografi dan laporan-laporan

baik yang ada di Kecamatan Mertoyudan maupun yang terdapat pada dinas-dinas yang terkait dengan penelitian ini serta dari Badan Pusat Statistik Daerah.

5. Unit Analisis

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisis adalah:

- a. Kecamatan sebagai institusi pemerintah.
- b. Industri kecil dalam wilayah kecamatan Mertoyudan.

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif . Menurut Noeng Muhajir dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif” menyatakan bahwa:

“Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan, hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai lawan bagi orang lain”.²⁷

Lebih lanjut, analisis ini merupakan pembentukan bagian-bagian yang

... ..

sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok analisa data.

Secara singkat proses analisa data, dimulai dengan penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Langkah berikutnya yaitu mengadakan redaksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu membuat rekaman proses inti permasalahan dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya ke dalam satuan-satuan (*Unityzing*), kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan (*Categorize*). Tahap akhir analisa data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan terhadap data. Setelah tahap tersebut selesai, tahap berikutnya adalah